

## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCABULAN ANAK DI KABUPATEN MAROS (Studi Kasus Tahun 2011-2013)**



**OLEH  
RURI FATIMANSARI  
B111 10 143**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENCABULAN ANAK DI KABUPATEN MAROS  
(Studi Kasus Tahun 2011-2013)**

**OLEH:  
RURI FATIMANSARI  
B111 10 143**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCABULAN ANAK DI KABUPATEN MAROS (Studi Kasus Tahun 2011-2013)**

Disusun dan diajukan oleh

**RURI FATIMANSARI**

**B 111 10 143**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Senin, 27 April 2015  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**

NIP. 19631024 198903 1 002

**Sekretaris**

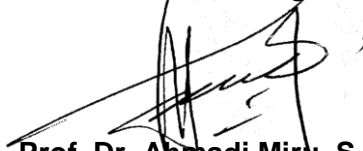


**Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.**

NIP. 19671010 199202 2 002

**An. Dekan**

**Wakil Dekan Bidang Akademik,**



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**

NIP. 1961 0607 198601 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

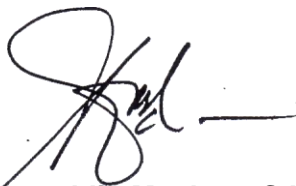
Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : RURI FATIMANSARI  
Nomor Pokok : B 111 10 143  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP  
KEJAHATAN PENCABULAN ANAK DI  
KABUPATEN MAROS (Studi Kasus Tahun  
2011-2013)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

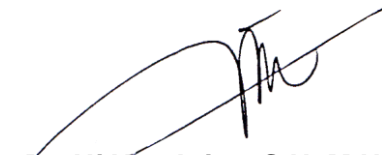
Makassar, Maret 2015

Pembimbing I



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing II



**Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

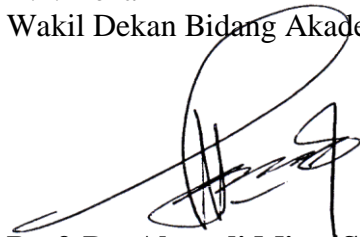
Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : **RURI FATIMANSARI**  
Nomor Pokok : B 111 10 143  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP  
KEJAHATAN PENCABULAN ANAK DI  
KABUPATEN MAROS (Studi Kasus Tahun  
2011-2013)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, April 2015

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 1961 0607 198601 1003

## ABSTRAK

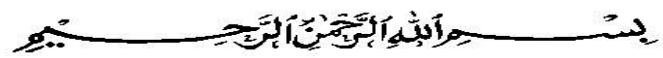
**Ruri Fatimansari** (B111 10 143). Dengan judul ***“Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Kabupaten Maros”*** (Studi Kasus Tahun 2011-2013). Dibawah bimbingan dan arahan Bapak **Syamsuddin Muchtar** selaku pembimbing I dan Ibu **Hj.Nur Azisa** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan anak sebagai korban kejahatan pencabulan di kabupaten Maros serta bagaimana upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencabulan di kabupaten Maros.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, khususnya di Polres Maros, dan Pengadilan Negeri Maros. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan wawancara, data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Maros memiliki peran secara aktif yang mendorong dirinya menjadi korban dengan menimbulkan rangsangan sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya dan ada pula yang berperan secara pasif yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya yang memiliki sifat dan karakter yang cenderung lemah fisik dan daya pikirnya, sehingga dalam hal ini anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Maros berdasarkan jenis korban kemudian dikategorikan sebagai *latent victims*. Adapun yang menjadi faktor pemicu seorang anak menjadi korban kejahatan pencabulan terkait peranannya dipengaruhi oleh faktor kepribadian, kepercayaan/iman, hubungan korban dengan pelaku, pendidikan, krisis moral di masyarakat, teknologi dan media massa, perhatian dan pengawasan orang tua/keluarga, perhatian masyarakat/lingkungan. (2) Upaya-upaya pencegahan terhadap fenomena kejahatan pencabulan anak yang dilakukan sebagai upaya pre-emptif yang dilakukan oleh orang tua yakni menanamkan nilai-nilai agama yang kuat kepada anak, menanamkan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat kepada anak, upaya preventif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian yakni mengadakan sosialisasi disekolah-sekolah seperti sekolah SMP dan SMA dan juga melakukan penertiban di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana melanggar norma kesusilaan, dan penjatuhan hukuman sanksi pidana oleh hakim sebagai upaya represif.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah yaitu skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di fakultas Hukum Universitas hasanuddin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, segenap keluarga dan para sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak dan langkahnya.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda **Tjetjep Agus Bahrum** dan Ibunda tercinta **Marwaty, S.H.** yang begitu menyanyangi Penulis dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang yang mereka curahkan yang tak pernah ada habisnya, mereka rela banting tulang tak kenal siang dan malam, hujan ataupun terik matahari

mereka lalui untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis baik berupa kebutuhan materi maupun imateri sejak Penulis masih berada dalam kandungan hingga Penulis menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini takkan mampu membalas segalanya yang telah beliau berikan. Serta saudara kandungku tersayang **Nurul Agmar, S.Kom.** dan **Abdul Hamid Al-Bayani** yang selalu memberikan dukungan dan kehangatan kasih sayang yang tak ternilai harganya, dan juga begitu banyak jasa mereka yang Penulis tidak mampu membalasnya.

Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritikan dan saran selama Penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum.**, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Dekan I Bapak **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.**, Wakil Dekan II Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.** dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak **Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.**



3. Bapak **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.** selaku Penasihat Akademik yang banyak memberi masukan bagi Penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan Ibu **Hj. Nur azisa, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.** Bapak **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.** Bapak **H.M. Imran Arief, S.H., M.H.** dan Bapak **Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.** selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan selama penyusunan skripsi ini.
6. **Seluruh Dosen, pegawai, pekerja, staf bagian Hukum Pidana, serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan ilmu, nasihat, kebaikan, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
7. Bapak **Farid Hidayat Sapomena, S.H., M.H.** (Hakim Anak di Pengadilan Negeri Maros), Bapak **AIPTU Amran T** (Kanit PPA Polres Maros) serta **Bapak dan Ibu Pegawai di Pengadilan Negeri Maros** maupun **Polres Maros** yang memudahkan dan membantu penulis dalam memperoleh data dari lokasi penelitian.

8. Kakanda Senioriku **Muh.Basit, S.H., Moh.Rahman, S.H., Andi Firdaus Samad, S.H., Muh. Reindra Parani, S.H. Alim Bahri, S.H., Alif Arhanda Putra,S.H., Suardi,S.H.**, yang telah banyak memberikan kritik, saran serta masukan dalam penyusunan skripsi ini, juga bimbingan maupun inspirasi sejak Penulis menginjakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Teman-teman kesayangan dan seperjuangan **RURI FATIMANSARI, Yuli Moelawati Pratama, Dessy Arky Syafitri** yang telah banyak melukiskan tinta berharga dan penuh makna disepanjang perjalanan Penulis yang tidak pernah lelah menasihati, berbagi ilmu, memberi bantuan, motivasi, perhatian dan ketulusan dalam menemani Penulis dari awal perjalanan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sejak mengenakan Hitam-Putih MABA hingga mengenakan Hitam-Putih Almamater untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman **LEGITIMASI 2010** yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Seluruh **Keluarga Besar UKM Sepak Bola FHUH** (Viva The Yellow Submarine), dan **ALSA LC UNHAS** untuk ilmu dan kebersamaanya.
12. Seluruh warga **HPPMI MAROS** terkhusus **HPPMI MAROS UNHAS-PNUP** teman-teman setanah maros dan seperjuangan

yang banyak memberi motivasi selama Penulis menimba ilmu di kampus merah tercinta dan dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Sahabat-sahabat terbaikku **GRZT, Rini Noor Endah Sari, Pratiwi Hamzah, Khalidasiah Yusuf, Resky Anisa, Herlinda Herman, Suartini, dan Rizqa Andini Burhan** yang tak pernah lelah memberi bantuan pikiran dan tenaga serta mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh Rekan dan Saudara setanah Nuha sedanau Matano **KKN Reguler Gel.85 Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur**. Personil **Desa Nuha, Sorowako, Nikkel, Magani dan Matano** yang tidak dapat disebutkan satu persatu serta **Bapak Supervisor yakni Pak Dahlan** yang telah memberi motivasi untuk kami sesegera mungkin menyelesaikan studi.
15. Sahabat terbaik **Bachri Ilman** yang ada untuk Penulis dan telah memberi inspirasi, informasi, dan bantuan lainnya selama penyelesaian skripsi ini. Dan juga **Andi Akbar**, abang kesayangan yang banyak memberikan semangat dan dorongan bagi Penulis serta begitu pengertian sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini maupun studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
16. Keluarga Besar **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan**, terkhusus rekan-rekan di **Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa** dan

**Letting 2013 Kemenkumham**, semoga segala ilmu yang didapatkan selama menempuh pendidikan untuk gelar sarjana dapat bermanfaat bagi Penulis saat menjalankan tugas sebagai abdi Negara.

17. Keluarga Besar **Latief** dan **Bayan** yang Penulis sayangi, Terima Kasih atas support dan kasih sayangnya.

18. Semua pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Sebagai penulis, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua orang dan terkhususnya untuk penulis sendiri. Amin.

Makassar, 21 April 2015

Penulis

**Ruri Fatimansari**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Viktimologi.....	10
1. Pengertian Viktimologi .....	10
2. Ruang Lingkup Viktimologi .....	12
3. Manfaat Viktimologi.....	14
B. Korban Kejahatan .....	19
1. Pengertian Korban Kejahatan .....	19
2. Peran Korban Dalam Terjadinya Kejahatan.....	22
C. Anak.....	27
1. Pengertian Anak .....	27

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	32
3. Anak Sebagai Korban Kejahatan .....	35
D. Kejahatan Pencabulan .....	37
1. Pengertian Kejahatan .....	37
2. Kejahatan Pencabulan Menurut KUHP .....	40
3. Kejahatan Pencabulan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	49
E. Teori-Teori Penanggulangan Kejahatan .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Lokasi Penelitian .....	57
B. Jenis Dan Sumber Data .....	57
C. Teknik Pengumpulan Data .....	58
D. Teknik Analisa Data .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Peranan Anak Sebagai Korban Kejahatan Pencabulan di Kabupaten Maros .....	66
B. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Pencabulan di Kabupaten Maros .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan yang memiliki makna bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, dimana pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan HAM dalam sistem pemerintahan Indonesia, dalam upaya memajukan penghargaan dan pemenuhan hak-hak warga negara telah dimasukkan ke dalam Undang Undang Dasar 1945 hasil dari amandemenya. Pengakuan HAM secara tertulis di konstitusi diatur pada BAB XV mulai Pasal 28A s.d. 28J yang merupakan pengakuan negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, yakni: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian telah lengkap bahwa konstitusi telah dimasukkan pilar-pilar demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara hukum.

Dokumen Internasional yakni *UN Resolution on Protection of the Human Rights of Victim of Crime and Abuse of Power 1990* dan

*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* telah mengkategorikan korban dalam dua hal yakni, korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan. Deklarasi ini memberikan pemikiran tentang perkembangan hukum pidana, atau setidaknya memberikan sumbangan pemikiran tentang posisi hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Perlindungan terhadap korban itu sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 4, bahwa perlindungan saksi dan korban adalah diperlakukan dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setara peradaban manusia itu sendiri.

Perlindungan yang diberikan meliputi perlindungan secara fisik maupun psikis. Norma perlindungan terhadap saksi dan korban diukur dari tingkat ancaman selain dari pada pihak pelapor juga dari pejabat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim, pengacara, atau wartawan media cetak maupun elektronik yang meliputi suatu peristiwa pidana yang memiliki resistensi tinggi.

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan (tindak pidana). P.Cornil pada tahun 1959<sup>1</sup>, berkesimpulan bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dan harus diperhatikan dalam membuat kebijakan kriminal dan juga pembinaan para

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012., hlm 32.



perilaku kejahatan (tindak pidana). Karena pemahaman terhadap korban kejahatan akan berkaitan dengan keterlibatan pemerintah, negara dan masyarakat, serta individu dan keterlibatan pihak korban itu sendiri sebagai bahan pengambilan kebijakan dan penentuan tindakan-tindakan prevensi, tindakan represif terhadap kejahatan, serta pelayanan sosial, guna kepentingan menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Masalah korban kejahatan bukanlah masalah baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Arif Gosita<sup>2</sup>, memahami korban serta permasalahannya merupakan suatu kemutlakan untuk memahami kejahatan sebagai suatu kenyataan sosial disamping untuk menentukan kebijaksanaan mengatasinya.

Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.<sup>3</sup>

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm 38.

<sup>3</sup>Dikdik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007., hlm 34.

dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berbagai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait perlindungan hukum bagi anak, antara lain: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan lain sebagainya.

Arif Gosita<sup>4</sup> mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok) organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan mengingat situasi kondisi fisik dan psikis anak.

Bentuk Kejahatan yang marak terjadi terhadap anak salah satunya ialah kejahatan kesusilaan yakni lebih khususnya pelecehan dan kekerasan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk

---

<sup>4</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Cet-II., hlm 2.

melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.<sup>5</sup>

Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.<sup>6</sup>

Sebuah studi yang didanai oleh *USA National Institute of Drug Abuse* menemukan bahwa:

"Diantara lebih dari 1.400 perempuan dewasa, pelecehan seksual masa kanak-kanak terkait dengan ketergantungan obat terlarang, alkohol, dan gangguan kejiwaan. Rasio keterkaitan itu sangat menyolok: misalnya, perempuan yang mengalami pelecehan seksual non kelamin pada masa kecil 2,83 kali lebih besar ketergantungan obat ketika dewasa dibandingkan dengan perempuan normal."<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>[http://www.id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_seksual\\_terhadap\\_anak#Sejarah](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak#Sejarah). halaman ini diakses pada 30 Oktober 2013 pukul 14.55 WITA.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

Anak yang dilecehkan secara seksual menderita gejala psikologis lebih besar dibanding anak-anak normal lainnya. Sebuah studi telah menemukan gejala tersebut 51% sampai 79% pada anak-anak yang mengalami pelecehan seksual. Resiko bahaya akan lebih besar jika pelaku adalah keluarga atau kerabat dekat, juga jika pelecehan sampai ke hubungan seksual atau paksaan pemerkosaan, atau jika melibatkan kekerasan fisik. Tingkat bahaya juga dipengaruhi berbagai faktor seperti masuknya alat kelamin, banyaknya dan lama pelecehan, dan penggunaan kekerasan *The social stigma of child sexual abuse may compound the psychological harm to children*, dan pengaruh yang merugikan akan kecil dampaknya pada anak-anak yang mengalami pelecehan seksual namun memiliki lingkungan keluarga yang mendukung atau mendampingi paska pelecehan.<sup>8</sup>

Suatu peneliti menyatakan bahwa lebih dari 70% pelaku adalah anggota keluarga dekat atau seseorang yang sangat dekat dengan keluarga. Peneliti lain menyatakan bahwa sekitar 30% dari semua pelaku pelecehan seksual yang berkaitan dengan korban mereka, 60% dari pelaku adalah kenalan keluarga, seperti pengasuh, tetangga atau teman dan 10% dari pelaku dalam kasus-kasus pelecehan seksual anak orang asing. Pelanggar pelecehan seksual terhadap anak di mana pelaku

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

berkaitan dengan anak, baik dengan darah atau perkawinan, adalah bentuk inses digambarkan sebagai pelecehan seksual anak *intrafamiliar*.<sup>9</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat data kasus kejahatan seksual terhadap anak mengatakan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia ibarat puncak gunung es. Senada dengan itu, Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa<sup>10</sup>:

“Karena banyaknya kasus, Komnas PA menetapkan tahun ini sebagai Tahun Darurat Seksual Terhadap Anak”.

Kejahatan kesusilaan khususnya pencabulan tidak selamanya terjadi karena ada faktornya dari pelaku, namun juga biasa terjadi karena disebabkan oleh korban. Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga seseorang bisa menjadi korban kejahatan Pencabulan dan sebagainya. Berangkat dari pemikiran bahwa masalah anak adalah permasalahan yang rumit dan sulit sehingga pencegahan maupun penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama maka, berdasarkan latar belakang di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai ***“Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Kabupaten Maros (Studi Kasus Tahun 2011-2013)”***.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup><http://www.lensaIndonesia.com/.../banyak-kasus-seksual-anak/komnasPA>.halaman ini diakses pada 30 Oktober 2013 pukul 15.00 WITA.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, Penulis menentukan pokok-pokok pembahasan atau rumusan masalah yang hendak diteliti, yakni:

1. Bagaimanakah peranan anak sebagai korban dalam kejahatan pencabulan di Kabupaten Maros?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Maros?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan anak sebagai korban dalam kejahatan pencabulan di Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Maros.

## **D. Manfaat Penelitian**

Melalui Penelitian hukum ini, penulis harapkan dapat memberi manfaat untuk banyak hal terutama sebagai berikut :

- a. Dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu baik bagi penulis sendiri pada khususnya maupun mahasiswa hukum pada umumnya.
- b. Menjadi masukan bagi para penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat dalam hal mencegah dan menanggulangi anak sebagai korban kejahatan pencabulan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Viktimologi

##### 1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>11</sup>

Pada dasarnya perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari Hans Von Hentig<sup>12</sup>, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelshohn pada tahun 1947 yang sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi.<sup>13</sup>

Made Darma Weda<sup>14</sup> membagi fase perkembangan viktimologi dalam tiga fase yakni pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “*penal of special victimology*” sementara itu pada fase kedua viktimologi tidak hanya

---

<sup>11</sup>Dikdik M.Arief Mansur &Elisatris Gultom, *op.cit.*, hlm 34.

<sup>12</sup>Analisis menyeluruh mengenai hubungan interaksi antara pelaku dan korban merupakan hasil analisis Hans Von Hantig yang berjudul *remarks on the interaction of prepetrator and victim* (1941), Chaerudin dan Syarif Fadilah dalam Siswanto Sunarso,*op.cit.*, hml 12.

<sup>13</sup>Dikdik M.Arief Mansur &Elisatris Gultom, *op.cit.*, hlm 35.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 35.



mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*”. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”.

Viktimologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang cukup baru menjadi ruang tersendiri bagi para ilmuan dan para ahli untuk mengembangkan berbagai rumusan mengenai viktimologi. Salah satunya ialah J.E Sahetapy<sup>15</sup> yang mengartikan viktimologi adalah ilmu atau disiplin ilmu yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Sedangkan Arif Gosita<sup>16</sup> menjelaskan bahwa:

“ Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai obyek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal (viktifikasi kriminal) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut, antara lain sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor viktimogen atau krimminogen (menimbulkan korban dan kejahatan). Salah satu akibat pengorbanan yang mendapatkan perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial, kerugian ekonomi, dan kerugian moral. Kerugian-kerugian tersebut hampir sama sekali dilupakan atau diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pembina masyarakatan”.

Arif Gosita<sup>17</sup> juga mengemukakan bahwa Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktifikasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu

---

<sup>15</sup> Muhadar, *Viktifikasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006., hlm 19.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 20.

<sup>17</sup> Dikdik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, *op.cit.*, hlm 35.

kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi;
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

## **2. Ruang Lingkup Viktimologi**

Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan kriminologi. Sekalipun usianya relatif muda, namun peran viktimologi tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu yang lain, dalam kaitan pembahasan mengenai fenomena sosial.

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.<sup>18</sup>

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 33.

korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>19</sup> Selain itu menurut Muladi, viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

1. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberi penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi<sup>20</sup>;
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Objek Studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita<sup>21</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai macam viktimisasi atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 43.

<sup>20</sup>Viktimisasi merupakan penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga pihak tertentu, pihak pemerintah, sehingga korban bukan saja perorangan melainkan sekelompok orang atau komunitas tertentu atau sebagian rakyat yang menderita, bukan saja secara fisik melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomi, sosial, agama dan dalam arti psikis secara luas. J.E Sahetapy dalam Muhadar, *op.cit.*, hlm 22.

<sup>21</sup>Andi Winarni, *Tinjauan Viktimologi terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Makassar*, Skripsi: 2013., hlm 11.

- e. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut, (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama menurut Arif Gosita<sup>22</sup>, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.

Ruang lingkup dari viktimologi itu sendiri mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.

### **3. Manfaat Viktimologi**

Perkembangan kajian mengenai korban tindak pidana menunjukkan peranan viktimologi yang perlu mendapatkan tempat tersendiri dan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm 12.

perhatian yang serius karena melalui viktimologi akan dapat diperoleh masukan dalam menghadapi dan menanggulangi masalah kejahatan, sebagaimana yang diketahui manfaat dari viktimologi itu sendiri yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar dari hasil studi maupun penelitiannya.

Arif Gosita,<sup>23</sup> Perkembangan dan manfaat viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, yang mana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbunan korban, serta akibat-akibat penimbunan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Kenyataan sosial yang dimaksud disini dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta atau pemerintah.

Akibat-akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan-tindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku, serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Sikap dan tindakan yang diambil dapat berupa pula merupakan berbagai ancaman kepedihan dan penderitaan bagi yang bersangkutan. Misalnya pemberian imbalan hukuman yang berlebihan diluar kemampuan untuk dihukum pihak pelaku, pemberian hukuman secara kolektif pada

---

<sup>23</sup>Siswanto sunarso, *op.cit.*, hlm 61.

suatu kelompok karena seorang anggota kelompok tersebut telah melakukan suatu kejahatan.<sup>24</sup>

Arif Gosita<sup>25</sup>, Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu:

1. manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
2. manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
3. manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Selain itu juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, seberapa besar peranan

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm 62.

<sup>25</sup>Dikdik M.Arif Mansur & Elisatris Gultom, *op.cit.*, hlm 65.

korban pada terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia,<sup>26</sup> dengan adanya viktimologi, hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.

Manfaat mempelajari viktimologi juga dikemukakan oleh Siswanto Sunarso<sup>27</sup>, antara lain manfaatnya ialah untuk mengetahui hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban. Artinya proses viktimisasi dan viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi.

---

<sup>26</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum republik Indonesia.

<sup>27</sup>Siswanto sunarso, *op.cit.*, hlm 62.

Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, yang bertujuan untuk memahami tentang peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku yang sangat penting dalam rangka upaya kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam suatu viktimisasi baik sebagai korban struktural dan nonstruktural.

Secara praktis viktimologi bermanfaat untuk menyelamatkan orang dalam bahaya dari bahaya secara tidak langsung, memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal, mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, dan juga bermanfaat bagi kehidupan banyak orang karena merupakan studi mengenai hak serta kewajiban asasi manusia.<sup>28</sup>

Akhirnya viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm 62.

<sup>29</sup>Dikdik M.Arif Mansur & Elisatris Gultom, *op.cit.*, hlm 67.



## **B. Korban Kejahatan**

### **1. Pengertian Korban Kejahatan**

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum.<sup>30</sup>

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya ialah sebagai berikut<sup>31</sup>:

- a. Arief Gosita mengemukakan bahwa: "Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan".
- b. Ralph de Sola mengemukakan korban (*victim*) adalah: "*.. person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another..*"
- c. Z.P.Separovic mengemukakan korban (*victim*) adalah: "*.. the person who are threatened, injured or destroyed by an actor or omission of another (mean, structure, organization, or institution) and consequently; a victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offence, non*

---

<sup>30</sup>*ibid.*, hlm 45.

<sup>31</sup>*ibid.*, hlm 46-49.

*fulfillment of work duties) or an accidents. Suffering may be are also involved”.*

- d. Muladi juga berpendapat bahwa: “korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.
- e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;

“korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.

Sedangkan kejahatan atau lebih tepat dengan istilah tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang atau hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.<sup>32</sup> Arif Gosita<sup>33</sup> dalam merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan dalam arti luas adalah Suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi.

---

<sup>32</sup>Siswanto Sunarso, *op.cit.*, hlm 32.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm 37.

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, menurut Stanciu<sup>34</sup> yang dikutip Teguh Prasetyo, yang dimaksud dengan korban dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Stanciu selanjutnya menyatakan, bahwa ada dua sifat mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan).

Penegakan hukum sebagai wujud perlindungan hukum bagi korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarsi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>35</sup>

Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm 42.

<sup>35</sup>Dikdik M.Arief Mansur & Elisatris, *op.cit.*, hlm 23.

diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak diperdulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan<sup>36</sup>.

Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, sering kali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara. Sebaliknya pada saat korban tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai saksi di persidangan, ia dikenakan sanksi.<sup>37</sup>

## **2. Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan**

Korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan jika ia melaporkan pelaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm 24.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm 26.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm 27.

Arif Gosita<sup>39</sup> Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal (KUHP) lebih menitikberatkan perhatian pada pembuat korban (pelaku kejahatan) dari pada korban, seolah-olah terdapat suatu perbedaan atau pemisahan yang tajam antara si pembuat korban dengan si korban, walaupun keduanya memiliki peranan dan fungsional dalam terjadinya tindak pidana.

Jenis-jenis korban berdasarkan perkembangan ilmu viktimologi yang dikemukakan oleh Azzat Abdeh Fattah<sup>40</sup>, yaitu sebagai berikut:

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Proactive victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- d. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Tipologi korban (jenis-jenis korban) sebagaimana dikemukakan diatas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang dikemukakan oleh

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm 28.

<sup>40</sup>Muhadar, *op.cit.*, hlm 37.

Schafer<sup>41</sup> yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut:

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku .
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

Chaerudin Syarif Fadillah mengatakan bahwasanya korban hanyalah pelengkap atau sebagian dari alat bukti, bukan pencari keadilan.

Bahkan Geis berpendapat;<sup>42</sup>

*“ trend to be treated like pieces of evidence than like human beings”.*

Korban kejahatan umumnya akan mengalami berbagai penderitaan, sebagai contoh wanita korban perkosaan. Seorang wanita

---

<sup>41</sup>Dikdik M.Arief Mansur & Elisatris, *op.cit.*, hlm 50. Lihat juga Muhadar, *op.cit.*, hlm 38.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm 28.

korban perkosaan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat perkosaan, seperti perasaan kotor, berdosa dan tidak punya masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks diluar nikah.<sup>43</sup>

Korban perkosaan sering kali menjadi korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi, dan perawatan rumah sakit,<sup>44</sup> sedangkan pelaku apabila terluka dan membutuhkan perawatan, mendapat perlakuan khusus.

Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan.

Arif Gosita<sup>45</sup> mengemukakan tentang peranan korban dalam interaksi sosial mempengaruhi terjadinya kejahatan diantaranya ialah pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan, masing-masing memainkan peran yang penting dalam menentukan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing (relatif). Antara pelaku dan korban kejahatan ada hubungan fungsional dan juga pihak korban dapat memainkan beberapa peran yang penting dalam kejahatan, antara lain sebagai yang

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm 28.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm 29.

<sup>45</sup>Siswanto Sunarso, *op.cit.*, hlm 37.

merangsang, mengundang, dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan.

Dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana (kejahatan), Stephen Schafer<sup>46</sup> mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban (untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku).
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan (untuk tipe ini korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban).
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensi menjadi korban yakni anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik maupun mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya yang merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban (Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab).
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku, inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban misalnya pelacuran, perjudian, zina (dalam hal ini pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku).

---

<sup>46</sup>Dikdik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, *op.cit.*, hlm 50.



## **C. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.<sup>47</sup>

Pemahaman mengenai anak yang dianggap sebagai individu yang belum dewasa tercermin dari tingkah pola dan perilaku anak yang identik kematangan yang dimilikinya, baik itu kematangan jasmani yakni postur tubuh maupun kematangan rohani yakni meliputi kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial yang tidak dimilikinya selayaknya orang dewasa.

Memahami tentang anak untuk memudahkan dalam mengerti dan menghindari salah pemahaman kadar penilaian seseorang dikatakan

---

<sup>47</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada 10 November 2013, pukul 19.20 WITA

sebagai anak, maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak<sup>48</sup>:

1. Fase Pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan kedalam dua periode, yaitu:
  - a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.
  - b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral dimana terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas

---

<sup>48</sup>Wagiati Soetodjo, *op.cit.*, hlm 7-8.

dan adolesens, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa, masa ini dibagi menjadi:

- a. Masa awal pubertas
- b. Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* kedua, periode *verneinung*.
- c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari masa pubertas anak laki-laki.
- d. Masa *adolescent*, dimana terjadi perubahan-perubahan besar yang dialami anak diusia kurang lebih 17 hingga 21 tahun yang membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah yang lebih agresif sehingga pada masa ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan kedalam tindakan yang menunjukan ke arah gejala kenakalan anak.

Selanjutnya dari beberapa fase pertumbuhan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak, maka dapat didefinisikan lebih lanjut untuk menentukan batas usia anak, kapan seseorang dikategorikan sebagai anak.

Di tiap-tiap negara tidak ada yang sama dalam hal menentukan batas usia *juvenile delinquency*, misalnya di Inggris batas usia 8 tahun, Denmark 15 tahun, sedangkan hasil seminar tahun 1953 di *Rio de Jenerio* yaang mengambil batas usia 14 tahun, yang tidak dapat dipertanggung

jawabkan. Selanjutnya untuk mengetahui batas usia anak itu sendiri di Indonesia dapat dilihat dari hukumnya sebagaimana yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam:

- a. Hukum Islam, batasan anak tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah (*akil baligh*), baik pria maupun wanita.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “ Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.Berdasarkan *Judicial Review* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MA No.1/PUU-VIII/2010 dimana Frasa 8 dimaknai dengan 12 tahun.
- c. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- d. Anak menurut KUHP Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( BW ) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.
- f. Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.
- g. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- h. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak Pasal 1 ayat (3) : “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (26) memberi pengertian: “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”

Berdasarkan pengertian anak yang diartikan dalam berbagai Peraturan Perundang-Undang dan hukum yang berlaku di Indonesia diatas muncul berbagai persepsi mengenai pengertian anak itu sendiri yang mencerminkan tidak terdapatnya pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Akan tetapi, pengertian anak menurut konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on The Right of The Child*). Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi anak adalah sebagai berikut:

“anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar

baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>49</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu<sup>51</sup>:

“a) segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

b) segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah, dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan kerohanian dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin”.

---

<sup>49</sup> Maidin Gultom, *op.cit.*, hlm 33.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal 34.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal 34.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Sehingga yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.<sup>52</sup>

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat mengenai perlindungan anak, didasari pula pada Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak diantara lain ialah<sup>53</sup>:

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal 38

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm 39- 40



b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai memperoleh prioritas tinggi (*of paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip ini digunakan karena dalam hal anak “korban” disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya.

c. Ancangan daur kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung karena perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

### **3. Anak Sebagai Korban Kejahatan**

Anak rawan menjadi korban kejahatan dalam lingkungannya baik keluarga maupun masyarakat dikarenakan sifat dan karakteristik anak yang tengah mengalami perkembangan sosial dan emosional seperti halnya: Pengantaran rasa emosionalnya tidak tetap dalam proses kematangan jasmani, mudah dibangkitkan, putri menaruh perhatian pada anak laki-laki, ledakan emosi biasa saja, rasa kasih sayang seperti orang dewasa, senang sekali memuji dan mengagungkan, ingin mengetahui

segalanya, mau mengerjakan pekerjaan bila didorong oleh orang dewasa, dan lain sebagainya.<sup>54</sup>

Pengertian anak sebagai korban kejahatan menurut konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on The Right of The Child*), ialah anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya, serta anggota masyarakat disekitarnya.

Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yang dimaksud dilaksanakan melalui<sup>55</sup>:

- 1) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- 2) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

---

<sup>54</sup><http://wordpress.com/karakteristik-anak>, diakses pada 10 November pukul 21.35 WITA.

<sup>55</sup>Darwan Pinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Cet-II., hlm 163.

- 3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban, dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial;
- 4) dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai pengembangan perkara.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya<sup>56</sup>:

- 1) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
- 2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

#### **D. Kejahatan Pencabulan**

##### **1. Pengertian Kejahatan**

Kejahatan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa, dan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Selanjutnya pelaku Kejahatan disebut sebagai penjahat.

Diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Defenisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm 165.

yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Kejahatan sebagai masalah fenomena sosial tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.<sup>57</sup>

Kejahatan merupakan masalah manusia yang tidak henti-hentinya. Walaupun telah diterapkan sanksi yang berat, tetap yang namanya kejahatan itu merebah kesegala arah sampai ketitik nadinya. Terlepas dari permasalahan asal muasal kejahatan atau causa kejahatan, ada dua atau lebih manusia yang berkumpul, di situ mulailah terjadi penilaian dengan segala akibat dan komplikasinya atas sesuatu perbuatan atau perilaku dalam suatu pergaulan hidup. Dengan kata lain apa yang dinamakan dengan kejahatan ataupun pembangkangan atau *deviance* akan selalu ada dan hanya terdapat dalam suatu pergaulan bersama. Kejahatan akan selalu ada dan selalu ada didalam masyarakat.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008., hlm 206.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm 207.

Beberapa definisi tentang kejahatan<sup>59</sup>, diantaranya:

1. Menurut B.Simandjuntak, kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.
2. Menurut Van Bammelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak susila dan merugikan, dan menimbulkan banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.
3. Menurut R. Soesilo, ia membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Pengertian kejahatan dari beberapa pakar diatas mengatakan bahwa kejahatan dapat didefinisikan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan

---

<sup>59</sup><http://yosie-indra.blogspot.com/2013/08/kejahatan-dan-penjahat.html>. Diakses pada 23 Desember 2013 pukul 21.07 WITA.

dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya kejahatan adalah sebuah perbuatan yang anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.<sup>60</sup>

Perkembangan dan peningkatan kejahatan disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi didalamnya.

## **2. Kejahatan Pencabulan Menurut KUHP**

Kejahatan kesusilaan dalam hal ini adalah perbuatan cabul berasal dari kata “cabul” dalam kamus Bahasa Indonesia memuat arti perbuatan cabul adalah keji, kotor, dan tidak senonoh (melanggar kesopanan/ kesusilaan).

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm 206.

Pengertian perbuatan cabul menurut R. Soesilo<sup>61</sup> adalah sebagai berikut:

“Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada dan sebagainya”.

Kejahatan Kesopanan dibidang kesusilaan adalah kejahatan kesopanan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual (disebut kejahatan kesusilaan), terdiri dari <sup>62</sup>:

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (281)
- b. Kejahatan pornografi (282)
- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (283)
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (283 bis)
- e. Kejahatan perzinaa (284)
- f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (285)
- g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan diluar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (286)
- h. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan diluar kawin yang umurnya belum 15 tahun (287)
- i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (288)

---

<sup>61</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1995., hlm 212.

<sup>62</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005., hlm 5-6.

- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (289)
- k. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin (290)
- l. Kejahatan-kejahatan: bersetubuh dengan perempuan diluar kawin yang dalam keadaan pingsan (286), bersetubuh dengan perempuan yang umurnya belum 15 tahun (287), perkosaan berbuat cabul (289) dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun (290), dan dalam keadaan yang memberatkan, yakni apabila menimbulkan luka-luka berat bagi korban (291 ayat 1)
- m. Kejahatan perkosaan bersetubuh (285), bersetubuh dengan perempuan diluar kawin yang dalam keadaan pingsan (286), bersetubuh dengan perempuan yang umurnya belum 15 tahun (287), perkosaan berbuat cabul (289), dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun dalam keadaan memberatkan, yakni apabila menimbulkan akibat kematian korban (291 ayat 2)
- n. Kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (293)
- o. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (294)



- p. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (295)
- q. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (296)
- r. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (297)
- s. Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (299)

Perbuatan melanggar kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan, yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Perbuatan menyerang rasa susila disingkat menyerang kesusilaan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak konkret. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukan dimuka umum.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm 16.

Unsur dimuka umum inilah yang menjadi penyebab semua perbuatan diatas menjadi perbuatan melanggar kesusilaan, yang artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan melanggar kesusilaan. Walaupun unsur melawan hukum dalam kejahatan ini tidak dirumuskan sebagai unsur (tertulis), sudah pasti sifat tercela ini selalu ada, dan keberadaannya itu telah dengan sendirinya melekat pada unsur secara terbuka atau dimuka umum. Karena unsur dimuka umum dirumuskan, ini artinya menimbulkan sifat tercelanya perbuatan seperti diatas, dilakukan dimuka umum. Jika tidak dilakukan dimuka umum, sifat tercela perbuatan itu mungkin tetap ada. Akan tetapi, sifat itu terdapat pada unsur yang lain, dan menjadi kejahatan kesusilaan yang lain pula, dan menurut pasal ini bukan berupa pelanggaran kesusilaan. Misalnya pada perkosaan (285), sifat tercela itu berada pada unsur perempuan itu bukan isterinya. Perbuatan memegang buah dada seorang perempuan, sifat tercela itu berada atau melekat pada unsur perempuan itu bukan isterinya dan tanpa kemauannya, atau mungkin perempuan itu belum 15 tahun (290). Sifat melawan hukum yang terakhir ini bukanlah sifat melawan hukum dari perbuatan melanggar kesusilaan, tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan yang lain. Oleh karena itu, perbuatan tersebut merupakan kejahatan kesusilaan yang lain pula<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm 17.

Tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan tidak ada yang masuk pada jenis pelanggaran, semuanya masuk pada jenis kejahatan<sup>65</sup>. Tindak pidana kesusilaan yang berhubungan atau mengenai perbuatan cabul, seperti dimuat dalam Pasal-pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296 (berupa kejahatan)<sup>66</sup>.

Bersetubuh dengan perempuan bukan isterinya yang berumur 15 tahun merupakan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 287 KUHP, yang selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut<sup>67</sup>:

- a. Unsur-unsur Subjektif :
  1. Yang ia ketahui;
  2. Yang sepantasnya harus ia duga.
- b. Unsur-unsur Objektif :
  1. Barangsiapa;
  2. Mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan;

---

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm 55.

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm 9.

<sup>67</sup>P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Cet-II., hal 113-114

3. Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.

Unsur mengadakan hubungan kelamin disini oleh pelaku, tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan di luar antara alat kelamin pelaku dengan korban, melainkan harus terjadi persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, tetapi tidak diisyaratkan keharusan terjadinya *ejaculatio seminis*.

Berbeda dengan Pasal 285 dengan Pasal 286 dimana persetubuhan itu terjadi diluar kehendak korban perempuan, pada Pasal 287 ini persetubuhan itu terjadi atas persetujuan atau kehendak perempuan itu sendiri, artinya suka sama senang.

Menurut Adami Chazawi<sup>68</sup> Perempuan luar kawin, artinya bukan isterinya. Pada dasarnya hukum pidana tidak mengancam pidana pada perbuatan yang menyetubuhi perempuan belum berumur lima belas tahun. Jika perempuan itu adalah isterinya sendiri, kecuali apabila dari persetubuhan itu menimbulkan akibat luka-luka, luka berat atau kematian (Pasal 288).

Pengertian belum waktunya untuk dikawin adalah belum waktunya untuk disetubuhi. Indikator belum waktunya untuk disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan secara psikis. Bentuk fisik tampak pada wajah atau tubuhnya masih wajah anak-anak atau tubuh anak kecil, seperti tubuh

---

<sup>68</sup>Adami, *op.cit.* hlm 71.

anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dadanya atau belum tumbuh rambut kemaluannya, atau mungkin belum datang haidnya. Secara psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain-main seperti pada umumnya anak belum berumur lima belas tahun.<sup>69</sup>

Kejahatan Pasal 287 merupakan tindak pidana aduan relatif karena pengaduan itu berlaku atau diperlukan hanya dalam hal persetubuhan yang dilakukan pada anak perempuan yang umurnya dua belas sampai lima belas tahun atau jika dalam melakukan persetubuhan itu tidak ada unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 291 dan Pasal 294. Akan tetapi, apabila persetubuhan itu dilakukan pada anak perempuan belum berumur dua belas tahun, dan terdapat unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 291 dan Pasal 294, kejahatan itu bukan merupakan tindak pidana aduan,<sup>70</sup> melainkan delik biasa karena undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya pengetahuan atau dugaan dari pelaku sehingga pelaku pun tidak perlu mengetahui bahwa usia wanita yang mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya belum mencapai dua belas tahun.

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul<sup>71</sup> dirumuskan dalam Pasal-pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan Pasal 296, yang semuanya merupakan kejahatan, masing-masing adalah:

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm 71

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm 72.

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm 77-78.

1. Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.
2. Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain.

Pasal 290 angka (2) mengenai perbuatan cabul terhadap orang yang belum berumur lima belas tahun selengkapnya bunyi pasalnya yakni:

“barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini”.

Pasal 290 angka (3) berbunyi:

“barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain”.

3. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual)
4. Pasal 293 ayat (1) mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul:

“barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

5. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain.
6. Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain.
7. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencahariaan atau kebiasaan.

### **3. Kejahatan Pencabulan Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Perilaku seksual terhadap anak (*seksual abuse*) merupakan salah satu masalah dalam ruang lingkup penelantaran anak. Apabila penelantaran anak dengan segala eksese-eksesnya tidak segera ditangani, maka tidak dapat disangkal lagi akan masa depan bangsa yang suram. Alasan apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalam perilaku seksual adalah perilaku penyimpangan. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak.

Penetapan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang memberi perlindungan bagi anak Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam undang – undang perlindungan anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih memberikan perlindungan yang baik jika dibandingkan dengan KUHP. Dilihat dari delik tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 82 UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah”.

Sedangkan usaha perlindungan terhadap anak dari perbuatan kesusilaan tersebut yang diberikan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan yaitu melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung di dalam pasal 81 ayat(1). Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu serta mengiming-imingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam pasal 81 ayat (2). Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam pasal 82.



Menurut Simons<sup>72</sup>, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu berarti ataupun setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Adami Chazawi<sup>73</sup> juga mengatakan bahwa sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya wujud konkretnya cara kekerasan itu ada bermacam-macam yang tidak terbatas. Misalnya memukul dengan kayu, menempeleng, menendang, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya.

Selanjutnya ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku.<sup>74</sup>

Pengertian perbuatan memaksa (*dwigen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu agar orang lain yang betentangan kehendak dengan orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendak ada dua macam yakni menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya, atau orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang

---

<sup>72</sup>P.A.F Lamintaang dan Theo Lamintang, *op.cit.*, hlm 132.

<sup>73</sup>Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm 65.

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm 63.

yang memaksa.<sup>75</sup> Misalnya seorang laki-laki memaksa orang lain untuk mengelus-elus alat kelaminya, atau seorang lelaki memaksa seorang tuna susila untuk menjilati seluruh tubuhnya (disebut oleh kalangan mereka dengan mandi kucing), seorang perempuan dipaksa bertelanjang bulat, atau dipaksa memasukkan suatu benda ke alat kelaminya.<sup>76</sup>

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok *penis* atau *vagina*, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul ialah korban yang dipaksa adalah pasif, yang melakukan perbuatan cabul adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan, atau memegang alat kelamin perempuan itu.<sup>77</sup>

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm 65.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm 79.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm 79-80.

ialah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa.<sup>78</sup>

Menurut Simons, membujuk (*verleiden*) artinya pemakaian janji-janji atau khayalan-khayalan ataupun pemakaian dari cara-cara seperti itu. Akan tetapi, Hoge Raad mengatakan bahwa pengetahuan membujuk itu tidak mengharuskan orang memakai sarana-sarana tertentu untuk membuat seseorang melakukan suatu perbuatan. Sarana itu juga dapat berupa suatu permintaan untuk memegang penis pelaku misalnya.<sup>79</sup>

#### **E. Teori-Teori Penanggulangan Kejahatan**

Menurut G.P. Hoefnagels, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan, serta pemedanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*).<sup>80</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yakni<sup>81</sup>:

1. Lewat jalur penal (hukum pidana) yang lebih menitik beratkan pada sifat repressive;

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, hlm 86.

<sup>79</sup>P.A.F Lamintaang dan Theo Lamintang, *op.cit.*, hlm 147.

<sup>80</sup>*Ibid.*, hlm 140

<sup>81</sup>*Ibid.*, hlm 140

2. Lewat jalur non penal yang lebih mendekatkan pada sifat preventive atau pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi.

Penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal, sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.<sup>82</sup>

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat”.<sup>83</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam usaha penanggulangan kejahatan cara umum yang konsepsional, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>84</sup>:

- a. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana;

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, hlm 141.

<sup>83</sup>Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2010, Ed.1, Cet-3., hlm 77.

<sup>84</sup>Maidin Gultom, *op.cit.*, hlm 60.

- b. Perundang-Undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan;
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana;
- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas;
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas, dengan melalui pembinaan *sense of security* and *sense of responsibility* atas keamanan dan ketentraman daerahnya.

Teori penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu<sup>85</sup>:

#### 1. Pre-Emtif

Adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi

---

<sup>85</sup> <http://dedojcb.blogspot.com/hukum/teoripenanggulanagankejahatan>, diakses pada 14 November 2013 pukul 15.30 WITA.

kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

## 2. Preventif

Adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

## 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat dimana penulis akan melakukan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini. Adapun tempat atau lokasi penelitian tersebut adalah di wilayah Kabupaten Maros, khususnya pada Instansi Pengadilan Negeri Maros dan Kepolisian Resort Maros, sebab instansi-instansi tersebut yang melakukan proses penegakan hukum termasuk mengenai kejahatan percabulan anak.

##### **B. Jenis Dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

###### **1. Data Primer**

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung di lokasi penelitian dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Polisi yang telah menangani perkara kejahatan pencabulan anak.

###### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku, karya-karya ilmiah,

literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, internet, media cetak, dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data serta bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini, penulis menempuh cara sebagai berikut :

#### **1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini.

#### **2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis membaca dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel dalam berbagai media massa serta beberapa tulisan lain yang dianggap relevan dengan materi yang dibahas.

### **D. Analisis Data**

Data dari hasil penelitian penulis dianalisa dengan menggunakan teknik kualitatif yaitu teknik menganalisa permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan dengan fakta yang lain, untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan menjelaskan



dan menguraikan informasi yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan normatif deskriptif yaitu dengan menguraikan masalah sesuai data yang diperoleh di lapangan guna menghasilkan suatu kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang menimbulkan keresahan sehingga sangatlah perlu untuk mendapatkan perhatian agar kejahatan tersebut tidak lagi menjadi penyakit yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dapat menunjukkan bagaimana kualitas perlindungan yang diberikan terhadap anak di Indonesia sangatlah buruk. Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui media elektronik, “Setiap hari 5 sampai 10 anak menjadi korban kekerasan”<sup>86</sup>. Komnas PAI yakni Arist Merdeka Sirait juga mengatakan bahwa pada tahun terakhir yakni tahun 2013 ada tercatat sekitar 603 Kasus kekerasan anak di Indonesia, dan 52% merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Membahas mengenai bentuk kekerasan seksual terhadap anak, sebelumnya perlu ada pemahaman mengenai bagaimana bentuk kekerasan seksual yang dikemukakan oleh Bapak Kanit PPA Polres Maros yakni Bapak AIPTU Amran T. dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2014, dimana beliau

---

<sup>86</sup>RCTI Seputar Indonesia, *Kekerasan Seksual Anak*, jam tayang pada hari Minggu 5 Januari 2014 pukul 17.25 WITA.

mengemukakan bahwa kekerasan seksual atau pencabulan dapat dibedakan menjadi dua, yakni :

A. Kekerasan Seksual Berat yang terbagi menjadi beberapa diantaranya ialah:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, teror, terhina, dan merasa dikendalikan yang merupakan perbuatan cabul.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan atau menyakitkan, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
4. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
5. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

B. Kekerasan Seksual Ringan berupa pelecehan seksual secara *verbal* seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, dan secara *non verbal* seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

Kekerasan seksual baik berupa bentuk kekerasan seksual berat maupun kekerasan seksual ringan tidak hanya terjadi pada orang dewasa melainkan juga dapat terjadi pada anak, juga dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Menurut Ezzat Abdel Fatah<sup>87</sup> Setiap anggota masyarakat potensial untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi korban kejahatan. Hanya saja apakah setiap orang menyadari hal itu dan berupaya untuk mencegah dirinya menjadi korban.

Ketika hal itu terjadi pada anak dimana anak yang menjadi korbannya maka secara tegas harus mendapat perhatian yang lebih mengenai bagaimana penanganannya terkait masalah kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak, terlebih ketika telah menjadi suatu bentuk kejahatan yang terjadi di suatu wilayah ditengah masyarakat.

Kejahatan kesusilaan dengan berbagai macam bentuknya tidak seperti kejahatan-kejahatan lainnya seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini penulis hanya membatasi pembahasan pada hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan pencabulan yang dilakukan terhadap anak di wilayah Kabupaten Maros yang semestinya mendapatkan perlindungan baik dari keluarga, masyarakat maupun negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

---

<sup>87</sup>P.A.F. Lamintang,*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997., hlm 193.

Berdasarkan apa yang di dapatkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, berikut adalah data dari Pengadilan Negeri Maros di bidang Hukum mengenai kejahatan pencabulan anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Maros. Penulis mengambil data dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang disajikan dalam tabel berikut :

**Jumlah Korban Kasus Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak  
di Kabupaten Maros Tahun 2011-2013**

Tahun	Jumlah	Korban	
		Usia 0-12 tahun	Usia 12-18 tahun
2011	5	1	4
2012	3	0	3
2013	10	2	8

**Tabel.1** \*Sumber : Pengadilan Negeri Maros

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Maros dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang telah di proses di Pengadilan Negeri Maros berjumlah 18 kasus. Dimana dari informasi data yang juga di peroleh, ada 3 (tiga) diantara 18 (delapan belas) kasus merupakan kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak pada tahun 2011-2013.

Jumlah korban kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak di Kabupaten Maros berdasarkan pada Tabel.1 diatas,

memperlihatkan jumlah anak yang menjadi korban pencabulan dan penulis juga mengklasifikasi atau membedakan korban berdasarkan kelompok usianya yang kemudian akan membantu dalam pembahasan mengenai peranan korban yang akan dibahas pada bagian selanjutnya dari bab ini. Terlihat di tabel bahwa pada tahun 2011 jumlah anak yang menjadi korban pencabulan ada sebanyak 5 orang, dimana anak yang berusia 0-11 tahun ada 1 orang dan yang berusia 12-18 tahun ada 4 orang. Kemudian pada tahun 2012 jumlah anak yang menjadi korban pencabulan ada sebanyak 3 orang, dimana anak yang berusia 0-11 tahun 0 atau tidak ada dan yang berusia 12-18 tahun ada 3 orang, selanjutnya di tahun 2013 jumlah anak yang menjadi korban pencabulan ada sebanyak 10 orang, dimana anak yang berusia 0-11 tahun ada 2 orang dan yang berusia 12-18 tahun ada 8 orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 jumlah korban pencabulan terhadap anak mengalami perubahan dimana dari tahun 2011 hingga tahun 2012 ada penurunan jumlah korban sedangkan di tahun 2013 jumlah korban meningkat tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yakni tahun 2012.

Peningkatan jumlah korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Maros yang terjadi pada 3 tahun terakhir berdasarkan data yang ada di Pengadilan Negeri Maros dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan yang terjadi di Kabupaten Maros. Meskipun pengertian kejahatan itu relatif, Menurut R. Soesilo yang membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis.

Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>88</sup> Penulis mengambil kesimpulan demikian karena berdasarkan teori ahli yang juga bersesuaian dengan beberapa putusan terkait pernyataan majelis hakim dalam memutus perkara kasus pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Maros sebagai hal yang dapat memberatkan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang menganggap perbuatan atau tindak pidana pencabulan terhadap anak telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dan hal ini juga dibenarkan oleh salah satu tokoh masyarakat pemerhati pemuda dan anak di kabupaten Maros yakni Bapak Arsyad yang mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap apa yang terjadi di kabupaten Maros saat ditemui pada hari Minggu, 1 Desember 2013 dalam diskusi ringan mengenai masalah pendidikan seks pada anak dimana beliau sangat menyayangkan fenomena kejahatan seksual yang terjadi di tengah masyarakat dirasa cukup menggelisahkan para orang tua di Kabupaten Maros sebab sangat disayangkan ketika anak yang menjadi korban padahal anak adalah harapan orang tua dan Negara ini. Banyak remaja atau muda mudi yang bergaul secara tidak sehat, berpacaran secara bebas dengan berpelukan

---

<sup>88</sup><http://yosie-indra.blogspot.com/2013/08/kejahatan-dan-penjahat.html>. Diakses pada 23 Desember 2013 pukul 21.07 WITA.

atau berciuman dengan lawan jenis (pacarnya) menjadi hal yang biasa, remaja putri mengumbar aurat dengan mengenakan pakaian yang tidak pantas saat berada di luar rumah, yang cukup meresahkan para orang tua dan masyarakat

Membahas mengenai masalah kejahatan maka perlu pula untuk dikaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab dan dampak dari kejahatan tersebut. Terjadinya suatu kejahatan itu dapat dilihat dari beberapa sudut pandang diantaranya ada yang melihat dari sudut pandang pelaku yang lebih dikenal dengan istilah kriminologi atau viktimologi yang merupakan ilmu hukum yang melihat suatu kejahatan dari sudut pandang korban.

Berdasarkan tujuan dari penulisan skripsi ini, maka pada pembahasan akan dipaparkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peranan korban dalam hal ini adalah peranan anak dalam terjadinya kejahatan pencabulan di kabupaten Maros serta bagaimana upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak di Kabupaten Maros.

#### **A. Peranan Anak sebagai Korban dalam Kejahatan Pencabulan di Kabupaten Maros**

Kejahatan tidak serta merta terjadi begitu saja, ada banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan baik faktor dari keadaan lingkungan, pelaku maupun faktor dari korban itu sendiri. Begitu



pula yang terjadi pada anak yang menjadi korban dalam hal ini khususnya korban pencabulan. Maka dari itu penyebab terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak juga dipengaruhi dari korban dan salah satunya ialah bagaimana peranan korban.

Dalam studi tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan korban, dengan demikian korban adalah patisipan utama meskipun ada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa korban, akan tetapi harus diartikan kejahatan yang tidak menimbulkan korban di pihak lain. Misalnya penyalahgunaan obat terlarang, perjudian, dan tindakan aborsi dimana korban menyatu dengan pelaku.<sup>89</sup> Karena itu korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan.

Memahami sejauh mana peranan korban dalam terjadinya kejahatan dapat diidentifikasi melalui beberapa jenis korban berdasarkan perkembangan ilmu viktimologi yang dikemukakan oleh Azzat Abdeh Fattah<sup>90</sup>. Untuk kejahatan pencabulan terhadap anak maka peranan anak sebagai korban pencabulan termasuk dalam *latent victims*, yakni anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik maupun mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya yang mudah menjadi korban karena kelemahan fisik serta sifat karakter tertentu yang dimiliki sehingga cenderung menjadi korban.

---

<sup>89</sup> Rena Julia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010., hlm 76.

<sup>90</sup> Muhadar, *op.cit.*, hlm 37.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Hakim Anak di Pengadilan Negeri Maros yakni Bapak Farid Hidayat Sopamena, S.H.,M.H. pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014, beliau mengemukakan bahwa peranan korban dalam terjadinya kejahatan pencabulan anak itu beragam. Pada dasarnya anak memiliki kondisi yang berbeda dengan orang dewasa sehingga sangat mudah bagi seorang anak untuk menjadi korban kejahatan dalam hal ini kejahatan pencabulan anak. Anak kurang mampu bertindak dan bereaksi secara tepat karena keterbatasan daya pikir, emosional, dan keadaan fisik yang lemah ketika sedang mengalami atau telah mengalami pencabulan dan kemudian berdampak pada peranan anak sebagai korban kejahatan pencabulan. Sebab ada anak atau korban yang berperan secara aktif yaitu anak dengan segala tingkah lakunya secara aktif mendorong dirinya menjadi korban dengan menimbulkan rangsangan terhadap pelaku sehingga terjadi kejahatan dan ada pula yang berperan secara pasif yaitu seorang anak yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya. Beliau juga mengemukakan dari beberapa kasus pencabulan yang terjadi di Kabupaten Maros dapat menunjukkan bahwa benar anak sebagai korban kejahatan pencabulan memiliki peranan yang relative dan beragam sesuai dengan situasi dan kondisi korban. Sebagai salah satu contoh beliau mengemukakan tentang kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi pada bulan Maret tahun 2013, perbuatan cabul dilakukan terhadap korban

inisial HM yang berusia 14 tahun. Dalam kejadian ini, korban yang kebiasaannya menumpang mobil dari perlimaan bandara Sultan Hasanuddin untuk pulang kerumah karena kebetulan rumahnya berada di dalam kawasan bandara pada hari yang naas itu menjadi korban perbuatan cabul. Saat HM sedang menunggu tiba-tiba ada mobil yang berhenti di depannya, kemudian korban mengatakan “bisa numpang masuk om” dan korban pun diperbolehkan naik kemudian duduk dibagian depan samping pelaku yang tidak dikenalnya. Kemudian korban diajak ngobrol oleh pelaku saat berada dalam perjalanan dan tidak lama mobil ditepikan dan pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban di dalam mobil yang tertutup dan terkunci rapat.

Sedangkan dalam kasus lain yang terjadi pada seorang anak berusia 16 tahun inisial EN dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya oleh pacarnya sendiri bahkan persetubuhan yang dilakukan layaknya sepasang suami-isteri dimana pada awalnya korban merasa takut namun karena pelaku membujuk dan merayu serta menjanji akan bertanggungjawab dengan berkata “kau tunjukkan bukti cintamu kepada saya” maka korban membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya yang kemudian perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali antara bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Februari 2013 bahkan setelah pelaku telah menikah dan memiliki isteri (wanita lain) dan anak sampai akhirnya korban hamil dan diketahui oleh orang tuanya lalu pelaku dilaporkan oleh orang tua korban karena perbuatannya.

Dari kedua kasus tersebut memberikan sedikitnya gambaran mengenai bagaimana peranan anak sebagai korban dalam terjadinya kejahatan pencabulan terhadap dirinya. Pada kasus yang pertama anak tidak menghendaki perbuatan tersebut dilakukan terhadap dirinya, akan tetapi apa yang anak itu lakukan dengan kurang berhati-hati saat berada di luar rumah, saat bersama orang yang tidak dikenal, menyebabkan ia menjadi korban kejahatan pencabulan. Karena anak perempuan yang mulai memasuki fase remaja mulai mengalami perubahan-perubahan fisik karena hormon yang dimiliki dimana tubuh dan bokong mulai berbentuk, munculnya buah dada yang kemudian dapat merangsang nafsu birahi dari lawan jenis. Oleh karena itu anak tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena orang tua juga perlu melakukan perlindungan terhadap anak agar tidak terjadi hal demikian.

Pada kasus kedua anak yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut menunjukkan karakternya sebagai seorang anak dengan ketidakmampuannya dalam mengontrol diri yang menunjukkan kelemahan daya berfikirnya yang kurang matang dan rasional sebab pada dasarnya anak memiliki keterbatasan dalam menentukan sikap, yang kemudian menjadi berbahaya ketika anak yang mulai tumbuh memasuki fase remaja dan sudah mulai memiliki rasa ketertarikan dengan lawan jenis serta mengenal arti pacaran kemudian terjerumus dalam nafsu dan menyebabkan dirinya menjadi korban perbuatan cabul. Dan pada contoh ini dapat dikatakan anak sebagai korban berperan secara aktif dalam

terjadinya kejahatan pencabulan terhadap dirinya yang berpartisipasi secara aktif dan menimbulkan rangsangan terhadap pelaku sehingga mendorongnya menjadi korban.

Di satu sisi yang juga coba dikemukakan oleh Bapak Kanit PPA Polres Maros APTU Amran T pada wawancara yang dilakukan hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 mengenai peran anak sebagai korban kejahatan pencabulan yang mengemukakan tentang kasus yang terjadi pada bulan Desember tahun 2013 terhadap anak usia 7 tahun yang mendapatkan perlakuan tidak senonoh dan keji oleh seorang bujang sekolah SD (Sekolah Dasar) berumur 45 tahun. Dimana pada kejadian ini, sekitar pukul 15.00 WITA korban berada di lingkungan sekolah SD tersebut untuk bermain-main bersama temannya saat keadaan sekolah sepi karena jam sekolah telah berakhir. Lalu kemudian temanya pulang karena dipanggil oleh orang tuanya sehingga korban tinggal sendirian bermain namun pada saat itu juga pelaku sedang berada dalam kantor sekolah, melihat korban sendirian pelaku kemudian menarik korban masuk kedalam ruangan kantor dan kemudian melakukan perbuatan bejatnya dengan mencabuli korban dan setelah itu korban diberi uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dengan maksud membuat anak diam dan tidak memberitahukannya kepada orang lain mengenai apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. Sampai akhirnya diketahui oleh ibu korban ketika memandikan korban dan korban berkata dengan polosnya

“pelan-pelanki mama karena sakit kemaluanku”, korban mengaku sudah ditusuk kemaluannya sama pelaku.

Pada kasus ini, korban berperan secara pasif terhadap kejahatan pencabulan yang terjadi terhadap dirinya dengan kata lain korban tidak berbuat akan tetapi ada hal-hal lain yang mendorong dirinya sehingga menjadi korban. Hal-hal lain yang dimaksudkan ialah kondisi fisik korban yang lemah dimana anak dengan kondisi tubuh yang baru berusia 7 tahun ditarik oleh orang dewasa yang badannya jauh lebih besar dan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dimana korban pun tidak mengetahui apa yang terjadi dan yang dilakukan pelaku terhadap dirinya itu merupakan suatu kejahatan.

Dalam penjelasan beliau juga menyimpulkan bahwa pada umumnya anak sangat rentan menjadi korban kejahatan pencabulan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor pemicu yang melekat pada situasi dan kondisi anak yang memiliki banyak kelemahan terkait peranan anak sebagai korban kejahatan pencabulan. Beliau kemudian mengklasifikasikan anak yang berusia 0-11 tahun kebawah biasanya memainkan peran pasif sebagai korban dalam terjadinya kejahatan pencabulan karena hal itu pula yang membuat anak mengalami trauma yang cukup besar. Sedangkan anak yang berusia 12-18 tahun terkadang memainkan peran aktif dalam terjadinya kejahatan pencabulan terhadap dirinya karena korban tidak terlalu menunjukkan dan mengalami traumatik *pasca* menjadi korban khususnya pada kasus pencabulan yang dilakukan

oleh pacar korban sendiri. Hal ini diutarakan berdasarkan pengalaman yang beliau hadapi saat melakukan penyidikan di Polres Maros khususnya terhadap kasus pencabulan anak.

Berikut penulis juga sajikan tabel mengenai kasus kejahatan asusila/seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Maros berdasarkan data dan laporan yang diterima di Polres Maros dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Untuk memahami lebih jelas mengenai peranan anak sebagai korban kejahatan pencabulan. Serta melihat fenomena kejahatan pencabulan terhadap anak yang terjadi di kabupaten Maros, dan bagaimana penanganannya.

**Data Kasus Kejahatan Asusila/Seksual terhadap anak di Kabupaten Maros pada Tahun 2011- 2013**

Tahun	Jumlah	Status Perkara				
		P-21	Damai	ADR	Limpah Polsek	Tidak Cukup Bukti
<b>2011</b>	6	2	1	1	1	1
<b>2012</b>	6	3	3	0	0	0
<b>2013</b>	9	5	2	0	0	2

**Tabel.2** \*Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Maros

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kasus kejahatan asusila/seksual terhadap anak di kabupaten maros berdasarkan laporan yang diterima Polres Maros berjumlah keseluruhan sejak tahun 2011-2013 adalah sebanyak 21 kasus yang mengalami perubahan jumlah selama 3 tahun terakhir dimana pada tahun 2013 ada sebanyak 9 kasus dari tahun sebelumnya yakni tahun 2012 dengan jumlah 6 kasus

yang sama jumlahnya pada tahun sebelumnya di tahun 2011. Dengan rincian masing-masing ialah pada tahun 2011 kasus yang dilaporkan di Polres Maros sebanyak 6 kasus dimana kasus perkara yang berstatus P-21 ada 2 kasus, damai ada 1, ADR ada 1, Limpah Polsek ada 1, dan yang tidak cukup bukti ada 1. Selanjutnya pada tahun 2012 ada sebanyak 6 kasus dimana kasus perkara yang berstatus P-21 ada 3 kasus, damai ada 3, ADR tidak ada 0, Limpah Polsek tidak ada 0, dan yang tidak cukup bukti tidak ada 0. Kemudian pada tahun 2013 ada sebanyak 9 kasus dimana kasus perkara yang berstatus P-21 ada 5 kasus, damai ada 2, ADR tidak ada 0, Limpah Polsek tidak ada 0, dan yang tidak cukup bukti ada 2 kasus.

Perbedaan jumlah kejahatan pencabulan anak yang tercatat di Pengadilan Negeri Maros (lihat Tabel.1) dengan yang tercatat di Polres Maros (Tabel.2) menunjukkan bahwa penyelesaian dan pertanggungjawaban pelaku kejahatan pencabulan anak tidak semuanya berakhir di meja hijau, dari data yang diperoleh, kasus pencabulan anak yang tercatat sebagai kasus pengaduan di Polres Maros ada yang berakhir dengan perdamaian antara pihak korban dengan pelaku karena pelaku kemudian akan bertanggungjawab untuk menikahi korban sebab korban dan pelaku mengakui bahwa perbuatan cabul yang terjadi akibat kehendak dari kedua belah pihak, biasanya diakui perbuatan cabul atau persetubuhan yang terjadi karena atas dasar suka sama suka yang



menunjukkan bahwa korban dan pelaku memiliki andil atau peranan dalam terjadinya pencabulan tersebut.

Peranan korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu, langsung atau tidak langsung. Peranan korban kejahatan antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dan dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak lain dan lingkungannya. Bahkan dalam terjadi kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.

Bambang Waluyo<sup>91</sup> menyatakan bahwa memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya pihak korban, misalnya korban lalai sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi juga dalam hal, korban menarik perhatian pelaku. Misalnya korban *overacting* atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, baik melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yang memahami maupun melalui studi pustaka serta mengamati fenomena yang terjadi khususnya di Kabupaten Maros mengenai masalah kejahatan pencabulan terhadap anak. Untuk itu, penulis coba mengemukakan beberapa hal mengenai apa saja yang sebenarnya atau kemudian dapat menjadi faktor pemicu seorang anak menjadi korban kejahatan pencabulan terkait peranannya

---

<sup>91</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011., hlm 21.

yang secara garis besar dibagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal dari korban yang lebih rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Internal ialah faktor pemicu yang berasal dari diri korban yang terbagi lagi menjadi beberapa spesifikasi, yakni :

- a. Kepribadian

Kepribadian seseorang sangat menentukan besar kecil peranan dalam terjadinya suatu kejahatan. Begitu pula dengan korban kejahatan pencabulan anak, bagaimana kepribadian yang dimiliki korban dapat memperlihatkan posisi korban dalam terjadinya kejahatan terhadap dirinya. Korban yakni anak memiliki sifat yang cenderung mudah diatur, mudah menuruti perintah, mudah terpengaruh serta memiliki sisi kelemahan dalam menentukan sikap, berfikir secara matang dan rasional. Hal-hal ini kemudian yang dapat memicu anak sehingga mudah untuk menjadi korban pencabulan.

- b. Kepercayaan/Iman

Agama mengajarkan setiap umatnya dalam kebajikan, agama mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dikerjakan oleh umatnya karena dampak yang diberikan dari suatu perbuatan atau pekerjaan. Pengetahuan agama haruslah ditanamkan dan diajarkan pada anak sedini mungkin, karena bekal pengetahuan mengenai agama yang diyakini akan membawa anak dalam bersikap dan berperilaku. Krisis kepercayaan atau keimanan seorang anak akan mendorong anak melakukan hal-hal yang tidak baik dan dilarang

oleh agama, misalnya bergaul dengan lawan jenis tanpa mengenal batasan dengan berpacaran, ciuman, pelukan, bahkan melakukan perbuatan mesum dan hubungan badan yang merupakan dosa besar, keluar rumah dengan menggunakan pakaian tidak sopan yang mengundang mata serta nafsu kaum lelaki, hal ini yang sering terjadi pada anak usia remaja yang mulai mencari jati diri mengalami krisis moral ditengah kehidupan masyarakat. Sehingga dengan mudah keadaan seperti ini menjadi peluang oleh pelaku untuk melakukan kejahatan pencabulan terhadap korban.

c. Hubungan Korban dengan Pelaku

Hubungan korban dengan pelaku merupakan hal yang seringkali dimanfaatkan dalam terjadinya suatu kejahatan. Misalnya saja korban yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku, kondisi korban yang berada dalam satu rumah dengan pelaku sehingga sering terjadi interaksi antara pelaku dengan korban yakni bertemu melihat dan berdekatan yang kemudian menimbulkan hasrat atau nafsu birahi pelaku yang tidak terkontrol. Biasanya hal itu terjadi karena pelaku melihat anak yang sedang tidur dan tak berdaya, bernaafsu karena sering melihat bagian tubuh anak yang dapat menimbulkan nafsu pelaku baik karena sengaja maupun tidak sengaja.

Hubungan dekat antara pelaku dengan korban. Misalnya berteman atau pacaran, karena pelaku mengenal sehingga dapat

kapan saja dan dimana saja bertemu dengan korban kemudian memanfaatkan keadaan untuk melakukan kejahatan pencabulan terhadap korban baik itu direncanakan atau terjadi begitu saja karena pelaku sedang bersama dengan korban. Akan tetapi lebih parahnya ketika korban atau anak mencari atau mendapatkan kasih sayang dari pacarnya kemudian keadaan itu dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan pencabulan terhadap anak karena berada pada posisi dapat mengendalikan anak dan mempunyai rasa memiliki anak seutuhnya dalam hal ini anak tersebut sebagai pacarnya. Sehingga korban dengan ketidakberdayaannya atau bahkan keinginannya sendiri dalam kondisi seperti ini dapat dengan mudah menjadi korban pencabulan.

#### d. Pendidikan

Ada sebuah kutipan dari Sutherland dan Cressy yang mengatakan bahwa<sup>92</sup>:

“Kejahatan dan delikueni dapat pula merupakan akibat dari kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan.”

Pendidikan menentukan bagaimana pola pikir seseorang dalam bertindak dengan pengetahuan yang dimiliki. Pendidikan seks sejak dini yang diberikan kepada anak sangatlah penting karena faktanya anak yang menjadi korban pencabulan adalah anak yang minim

---

<sup>92</sup>G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977., hlm. 103.

pengetahuannya tentang seks. Pada umumnya anak kurang mendapatkan pendidikan seks di rumah baik dari orang tua atau anggota keluarga lainnya dikarenakan anak dianggap belum pantas untuk mendapatkannya dan juga membahas mengenai seks merupakan hal yang tabu terlebih bila disampaikan pada anak. Akibatnya anak akan mendapatkan pengetahuan atau informasi mengenai seks dari teman-temannya serta sumber lain yang kemudian malah dapat menyesatkan anak, yang lebih ironisnya ketika informasi itu malah didapatkan anak dari pelaku pencabulan yang dengan sengaja menyesatkan anak.

Pengetahuan hukum juga merupakan hal yang penting, dimana minimnya tingkat kesadaran masyarakat tentang hukum secara tidak langsung dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak, memicu adanya pelaku maupun korban pencabulan anak. Anak yang kurang memahami bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadapnya sebagai korban, bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu kejahatan, maupun pelaku serta orang tua atau masyarakat yang tidak memahami bahwa suatu perbuatan cabul yang dilakukannya terhadap anak diluar semestinya merupakan suatu kejahatan (kecuali meraba-raba atau menyentuh bagian tubuh anak untuk kepentingan pemeriksaan medis).

## 2. Faktor eksternal

#### a. Krisis Moral di Masyarakat

Kejahatan merupakan suatu fenomena ditengah masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dan salah satunya ialah aspek sosial budaya masyarakat. Pola kehidupan mengalami perubahan kearah yang negatif akibat perkembangan jaman yang tidak disikapi secara bijak. Misalnya saja dari perkembangan dunia *fashion* yang kebarat-baratan yang diadopsi oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran Indonesia dapat menjadi faktor pemicu munculnya korban kejahatan pencabulan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak APTU Amran T bahwa anak remaja yang mulai masuk dalam kehidupan masyarakat mencoba menemukan jati diri mereka melalui banyak hal yang menentukan eksistensi dirinya ditengah masyarakat salah satunya dengan bagaimana anak berperilaku, bergaul, berpakaian untuk menunjukkan diri di lingkungannya.

Gaya berpakaian yang minim, tidak sopan, ketat dan memperlihatkan keseksian tubuh, mengumbar aurat yang merupakan gaya berpakaian yang diadaptasi akibat perkembangan jaman terutama kaum wanita dan kemudian ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seks bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Anak berada pada usia perkembangan dimana seorang anak masih dalam taraf peniruan

orang-orang di sekitarnya karena anak adalah orang yang paling pandai dalam meniru. Sehingga dengan keadaan anak seperti ini akan membawanya pada situasi dan kondisi tertentu yang dapat mengundang, pelaku melakukan kejahatan pencabulan terhadap dirinya, untuk memenuhi hasrat seksual pelaku dengan melampiaskannya pada anak karena kondisi anak yang memicu timbulnya nafsu seks pelaku.

b. Teknologi dan Media Massa

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan dimanfaatkan oleh masyarakat juga dapat menjadi sarana yang dapat menjadi faktor penyebab munculnya korban kejahatan pencabulan terhadap anak. Khususnya di bidang komunikasi dan media massa. Bagaimana tidak, efisiensi dan efektifitas yang ditawarkan oleh beragam teknologi yang menjadi alat komunikasi dan informasi yang cepat kepada masyarakat dapat dimanfaatkan pula untuk hal-hal kejahatan.

Salah satu contoh ialah media cetak atau elektronik seperti majalah, bacaan-bacaan, gambar, film, serta video yang mengandung unsur-unsur pornografi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui alat elektronik atau alat komunikasi seperti *handphone*, komputer dan sebagainya tanpa pengaturan yang jelas serta pengawasan terlebih bila di akses oleh anak sehingga dapat secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi terjadinya

kejahatan pencabulan terhadap anak. Dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat mempengaruhi seseorang yang melihat atau mendengarnya dan juga dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan, dan pikiran yang tidak sehat

Faktanya 5 dari 18 kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Maros salah satu faktor penyebabnya ialah pelaku melakukan pencabulan terhadap korban dikarenakan pelaku terangsang setelah menonton video atau film porno. AM salah satu pelaku pencabulan anak pada Juli 2011 mengaku di persidangan bahwa benar ia melakukan pencabulan terhadap korban karena terangsang setelah menonton video mesum Ariel-Luna Maya lewat telepon selular miliknya. Dengan adanya perilaku seperti ini kerap kali anak yang menjadi korban pelampiasan nafsu seks orang dewasa atau bahkan oleh anak yang terjerumus dalam nafsu yang tidak terkontrol karena situasi dan kondisi anak.

c. Perhatian dan Pengawasan Orang Tua/Keluarga

Anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari orang tua, keluarga. Ketika anak tidak mendapatkannya maka anak kemudian akan mencari perhatian dan kasih sayang itu dari orang lain, terkadang anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua atau keluarga cenderung mendorong anak untuk melakukan hal-hal yang negatif untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang diinginkan dan ini sering terjadi pada tingkat anak yang telah



mengalami depresi akibat lingkungan keluarga yang kurang harmonis, tidak adanya kehangatan dalam keluarga. Misalnya saja orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak menjadi haus akan kasih sayang, merasa kurang diperhatikan dan kemudian anak yang mulai mengenal lawan jenis, berpacaran, mereka mencoba mendapatkannya perhatian dan kasih sayang itu dari pacarnya. Sehingga apapun yang kemudian diminta atau dilakukan pacarnya terhadap dirinya, anak akan mudah percaya dan dihasut. Atau bahkan lebih parahnya rela menjadi korban kejahatan pencabulan karena menganggap bahwa apapun yang terjadi terhadap dirinya orang tuanya tidak akan peduli dan justru dengan begitu anak akan mendapatkan perhatian dari orang tuanya akibat apa yang dilakukan atau terjadi terhadap dirinya.

Perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak pun harus sewajarnya sebab, terkadang anak yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang berlebih yang diberikan oleh orang tua tanpa memberikan pengertian yang cukup kepada anak yang kemudian membuat anak merasa tertekan dan merasa kebebasannya dirampas oleh orang tua, sehingga anak mencoba keluar dari tekanan, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi tentang hal-hal yang dilarang oleh orang tuanya sehingga terjerumus dalam pergaulan bebas, dalam hal-hal semacam ini anak tidak dapat dipersalahkan sebab pikiran-pikiran anak seperti itu adalah wajar

dikarenakan anak masih belum matang dalam berfikir dan memahami keadaan yang terjadi disekitarnya.

Pengawasan dari orang tua juga sangat penting dikarenakan salah satu fakta bahwa di masyarakat ada penyakit psikologi yang sering disebut dengan penyakit *phedofilia* yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan. *Phedofil* yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak. Penyebab penyakit *Phedofilia* ini sangat beragam ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya. Sehingga orang tua lah yang semestinya memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak mengontrol perilaku dan melakukan pengawasan terhadap kehidupan dan perilaku anak agar tidak menjadi pelaku maupun korban dari kejahatan pencabulan yang terjadi di tengah masyarakat.

#### d. Perhatian Masyarakat/Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak. Hal ini dikarenakan situasi dan keadaan lingkungan tempat tinggal anak yang mendukung dan memberi kesempatan untuk terjadinya

kejahatan pencabulan terhadap anak. Kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat, seperti maraknya tempat perkumpulan atau tongkrongan muda-mudi, membuat anak bergaul dengan bebas tanpa perhatian dari masyarakat sekitar serta perilaku ditengah masyarakat yang meminum-minuman beralkohol dapat juga menjadi salah satu faktor, dimana orang hilang akal sehatnya karena pengaruh minuman beralkohol dapat berbuat kejahatan yang lain. Terlebih lagi ketika di lingkungan tersebut minimnya fasilitas umum seperti lampu jalan/penerangan yang kurang memadai sehingga daerah yang dialalui ketika malam akan semakin menjadi gelap dan sepi sehingga dapat menjadi peluang untuk terjadinya kejahatan asusila seperti orang mabuk atau laki-laki yang menggoda wanita atau anak yang sedang jalan atau melintas, memperkosa, atau bahkan melakukan perbuatan cabul lainnya.

Selain lingkungan masyarakat tempat tinggal, yang perlu perhatian dan dilakukan pembenahan ialah pada lingkungan sekolah, serta lingkungan keluarga yang lebih dekat dengan anak. Para pengajar di sekolah juga harus memberi perhatian khusus terkait perilaku dan perkembangan anak, memberi perlindungan bagi anak ketika berada di lingkungan sekolah yang menjadi tugas dan tanggung jawab pihak akademisi. Serta lingkungan keluarga karena kejahatan pencabulan tidak hanya dapat terjadi pada anak oleh

orang lain akan tetapi dapat juga dilakukan terhadap anak oleh anggota keluarga sendiri yang disebut *inces*.

e. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penunjang dalam kehidupan setiap umat manusia, kebutuhan ekonomi atau keadaan keuangan dapat memicu terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak. Baik kejahatan itu dilakukan dan terjadi pada oleh orang yang berekonomi tinggi atau yang berekonomi lemah. Biasanya pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak memanfaatkan anak atau korban melalui keadaan ekonominya yang lemah. Salah satu contoh yang terjadi pada anak di Kabupaten Maros Nomor perkara : 176/Pid.Sus/2011/PN.Mrs. korban yang berinisial SV berusia 15 tahun, pada bulan Juli 2011 menjadi korban pencabulan dan persetubuhan oleh pelaku yang berinisial AR umur 28 tahun yang juga merupakan pacar korban. Pada kejadian ini awalnya pelaku bertemu dengan korban yang berkerja di cafe 33, lalu pelaku berkenalan dengan korban dan membawa pergi korban setelah membayar cas atau uang bayaran untuk membawa pergi korban keluar dari cafe 33 kepada pemilik cafe sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 3 hari kemudian pelaku dan korban berpacaran. Pelaku mengatakan akan menikahi korban dan menyuruh korban untuk berhenti bekerja di cafe 33 selanjutnya pelaku membayar biaya kost korban dan memberikan uang belanja

harian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selama berpacaran pelaku dan korban sering melakukan hubungan suami-isteri di kamar kost yang pelaku kontrakkan untuk korban.

Adapula yang terjadi pada bulan Maret 2012, RHM menjadi korban pencabulan oleh ANG yang telah bersekongkol dengan tante korban. Pada kejadian ini, awalnya pelaku mengajak tante korban dan korban untuk diajak jalan ke pasar malam oleh sebab itu korban bersedia ikut, akan tetapi korban tidak mengetahui dimana lokasi pasar malam yang dimaksud. Kemudian pelaku mengajak tante korban dan korban untuk makan bakso terlebih dahulu lalu melanjutkan perjalanan ke Bantimurung, sampai di Bantimurung pelaku mengajak keduanya menuju wisata dekat kolam renang dan menyewa satu kamar dan menyuruh keduanya masuk ke kamar. Setelah kurang lebih 30 menit, tante korban keluar dengan alasan ingin mengambil dompetnya yang tertinggal di mobil dan pada saat itu, pelaku langsung memeluk, mencium, memegang payudara dan kemaluan korban, kemudian merebahkan tubuh korban ditempat tidur dan menindih korban yang mencoba melawan dan menangis karena korban mendengar pelaku mengatakan korban untuk diam karena telah memberikan uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada tantenya.

Dari beberapa faktor pemicu anak menjadi korban kejahatan akan memberi gambaran tersendiri bagaimana anak sebagai korban kejahatan

pencabulan memainkan peranannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki efek negatif terhadap anak.

#### **B. Upaya-upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Pencabulan terhadap Anak di Kabupaten Maros**

Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan pencabulan tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena akan ada banyak hambatan dan kendala yang ditemui. Sebab pada dasarnya kejahatan itu akan selalu ada selama manusia hidup di muka bumi dengan segala kodrat yang dimiliki oleh manusia. Akan tetapi dalam menekan angka kejahatan pencabulan terhadap anak khususnya yang dapat dilakukan di kabupaten Maros adalah dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak agar tidak semakin meningkat dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap dirinya. Untuk itu, penanganan terhadap suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan maupun penanggulangan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan kejahatan

pencabulan terhadap anak di Kabupaten Maros yang dibagi menjadi tiga yaitu:

#### 1. Upaya Pre-Emtif

Upaya yang dilakukan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan pencabulan terhadap anak yaitu dengan menanamkan nilai-nilai agama yang kuat kepada anak, menanamkan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat, sehingga anak mempunyai bekal pengetahuan serta iman dalam dirinya untuk bersikap dan bertindak. Mengetahui dengan jelas apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menurut ajaran agama dan norma yang ada. Karena pada dasarnya seseorang akan terbentuk kepribadian dan sifatnya dari apa yang dia dapatkan sewaktu kecil oleh sebab itu, pada tahap pencegahan ini orang tua yang memiliki peranan penting. Sebab anak mulai tumbuh dan berkembang awalnya dari lingkungan terdekat yakni keluarga. Memperlihatkan anak pada sikap-sikap dan sifat teladan dari orang tua, karena anak adalah peniru yang baik sehingga ketika anak mendapatkan hal-hal yang baik maka akan mendorong anak untuk kemudian melakukan hal-hal yang baik pula dikemudian hari saat berada dalam lingkungan masyarakat.

#### 2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya tingkat lanjut dari upaya pre-emptif, dimana upaya pencegahan yang dilakukan lebih berupa

tindakan atau wujud nyata dalam menekan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak. Upaya-upaya yang dilakukan berasal dari berbagai pihak yang berkaitan dengan masalah kejahatan tersebut. Untuk masalah kejahatan pencabulan terhadap anak, ada beberapa upaya preventif yang telah dilakukan diantaranya ialah:

a. Upaya dari pihak kepolisian

Pihak kepolisian dapat menekan angka kejahatan pencabulan terhadap anak dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan mengenai kejahatan tersebut serta dampak yang akan di timbulkan sehingga masyarakat akan tahu dan merasa takut untuk melakukan kejahatan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak AIPU Amran T selaku Kanit PPA Polres Maros, mengatakan bahwa upaya-upaya seperti halnya sosialisasi tersebut telah dilakukan di kabupaten Maros. Polres maros memiliki program untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memberi informasi kepada masyarakat terkait aturan-aturan yang berlaku. Untuk kejahatan pencabulan terhadap anak, sering dilakukan sosialisasi disekolah-sekolah seperti sekolah SMP dan SMA mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak. Serta mensosialisasikan bagaimana bahaya dan dampak dari seks bebas bagi anak usia remaja, dan



juga melakukan penertiban di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan.

b. Upaya dari masyarakat

Upaya yang dilakukan masyarakat dalam hal ini ialah menciptakan lingkungan yang harmonis, meningkatkan rasa kepedulian terhadap anggota masyarakat lainnya sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Upaya yang telah dilakukan para tokoh masyarakat bersama warganya ialah menumbuhkan rasa kepedulian untuk menjaga keamanan dan keharmonisan dalam lingkungan, dengan mengadakan jaga malam bergilir oleh warga atau ronda keliling untuk menjaga lingkungan dari hal-hal yang tidak di inginkan dalam hal ini mencegah warga dari perbuatan yang melanggar kesusilaan, mengadakan kerja bakti warga di lingkungan agar warga saling mengenal dan memiliki rasa persaudaraan yang kuat sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan sebab antar warga saling mengenal dan menjaga maka akan lebih peka dan peduli serta tidak acuh dan cuek ketika melihat anak yang kemungkinan dapat menjadi korban pencabulan atau perbuatan asusila lainnya.

c. Upaya dari orang tua/keluarga

Orang tua memiliki andil dalam hal pencegahan, dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang tua yang memiliki anak, mereka mengatakan bahwa upaya pencegahan agar anak tidak menjadi korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Maros dilakukan mulai dari lingkup keluarga kecil yang akan berpengaruh pada lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi. Sehingga yang dilakukan berupa memberikan perhatian, kasih sayang, dan kontrol yang baik terhadap sikap dan perilaku anak sebab telah menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga agar anak tetap berada dalam pengawasan orang tua untuk tidak melakukan hal-hal diluar dari norma agama maupun norma hukum yang berlaku. Dan hal tersebut dapan mencegah anak atau anggota keluarganya untuk tidak menjadi pelaku maupun korban dari kejahatan pencabulan terhadap anak.

### 3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan dimana kejahatan pencabulan terhadap anak telah terjadi. Akan tetapi pada tahap penanggulangan ini, yang kemudian akan menentukan bagaimana fenomena kejahatan tersebut terjadi di masyarakat.

Upaya penanggulangan ini berupa sarana penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku pencabulan anak untuk memberikan

efek jera. Hal ini merupakan tugas dari para penegak hukum yakni kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman dalam memberi hukuman terhadap pelaku kejahatan meskipun pada tahap penjatuhan hukumannya ada pada tingkat pengadilan oleh hakim. Untuk itu, Hakim di Pengadilan Negeri Maros yang memutus perkara kejahatan Pencabulan Anak di Kabupaten Maros telah berupaya memberikan putusan yang tegas dan tepat dalam memberikan saksi hukum bagi pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak. Karena secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan efek jera kepada pelaku juga memberikan efek psikologis dan sosial kepada masyarakat, karena seorang akan takut untuk melakukan kejahatan tersebut karena hukuman yang akan mengancam pelaku kejahatan.

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Maros yang mengadili beberapa kasus kejahatan pencabulan terhadap anak juga telah melakukan upaya represif ini dengan menimbang bahwa penghukuman yang diberikan kepada pelaku bukan semata-mata suatu pembalasan akan tetapi pembedaan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang salah bahwa pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan adalah salah dan harus tetap dihukum agar pelaku takut untuk mengulang perbuatannya lagi, serta dengan memberikan sanksi pidana yang adil kepada pelaku untuk mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun

yang baru. Dengan tetap memperhatikan apa yang menjadi harapan dan keinginan korban dalam menuntut keadilan terhadap dirinya tanpa mengesampingkan pula hak-hak pelaku.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Maros memiliki peran secara aktif yang mendorong dirinya menjadi korban dengan menimbulkan rangsangan sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya dan ada pula yang berperan secara pasif yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya yang memiliki sifat dan karakter yang cenderung lemah fisik dan daya pikirnya, sehingga dalam hal ini anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Maros berdasarkan jenis korban kemudian dikategorikan sebagai *latent victims*. Adapun yang menjadi faktor pemicu seorang anak menjadi korban kejahatan pencabulan terkait peranannya dipengaruhi oleh faktor kepribadian, kepercayaan/iman, hubungan korban dengan pelaku, pendidikan, krisis moral di masyarakat, teknologi dan media massa, perhatian dan pengawasan orang tua/keluarga, perhatian masyarakat/lingkungan.
2. Upaya-upaya pencegahan terhadap fenomena kejahatan pencabulan anak yang dilakukan sebagai upaya pre-emptif yang

dilakukan oleh orang tua yakni menanamkan nilai-nilai agama yang kuat kepada anak, menanamkan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat kepada anak, upaya preventif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian yakni mengadakan sosialisasi disekolah-sekolah seperti sekolah SMP dan SMA dan juga melakukan penertiban di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana melanggar norma kesusilaan, dan penjatuhan hukuman sanksi pidana yang tepat oleh hakim sebagai upaya represif.

## **B. Saran**

1. Pemerintah lebih memperhatikan masalah kesejahteraan sosial, sarana dan prasana umum bagi masyarakatnya sehingga dapat mengurangi angka kejahatan di tengah-tengah masyarakat, lebih tegas dalam membuat rambu-rambu hukum dan perlindungan terhadap anak maupun korban kejahatan, mengevaluasi kinerja para penegak hukum dan lebih peka memahami apa saja yang terjadi di masyarakat, memperbaiki masalah pendidikan bagi anak di tengah kondisi masyarakat yang majemuk.
2. Penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan oleh para penegak hukum sebaiknya dilakukan secara berkala dan tepat sasaran sehingga mencapai hasil yang diharapkan, memberi pelayanan kepada masyarakat dengan lebih meningkatkan ketertiban dan

keamanan sehingga tidak terjadi kejahatan di tengah-tengah masyarakat.

3. Kontrol sosial dalam masyarakat harus lebih ditingkatkan guna menjaga stabilitas kehidupan yang tentram dan damai, setiap anggota masyarakat lebih aktif dan agresif dalam menghadapi fenomena kejahatan yang terjadi disekitarnya dengan ikut berpartisipasi dalam memberantas pelaku kejahatan dan melindungi korban kejahatan, para tokoh agama lebih sering mengadakan pengajian, kebaktian ataupun ibadah lain bagi saudara-saudara seiman agar masyarakat yang beragama lebih terbentengi oleh iman untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma baik agama maupun norma hukum di masyarakat.
4. Orang tua/keluarga memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak serta menciptakan keharmonisan dan kehangatan bagi setiap anggota keluarga, melakukan *extra controlling* terhadap anak maupun anggota keluarganya secara bijak agar tidak terjerumus sebagai pelaku maupun korban kejahatan pencabulan anak.
5. Anak lebih berhati-hati dalam bergaul dan menyikapi apa yang terjadi pada dirinya, memperbanyak pengetahuan mengenai seks, pergaulan bebas serta aturan-aturan hukum dari orang-orang terpercaya seperti halnya orang tua atau guru, lebih

menjaga sopan santun dalam berpakaian, jangan berjalan atau berada sendirian ditempat yang sepi, gelap atau tertutup baik pada saat siang maupun malam hari, lebih terbuka pada orang tua atau orang yang dipercaya mengenai apa yang terjadi terhadap diri sendiri agar tidak salah langkah dalam mengambil tindakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Masalah Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Persada, Jakarta.
- Dikdik M.Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Rajagrafindo, Jakarta.
- G.W.Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Maidin Gulto, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PERSSindo, Yogyakarta.
- P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rena Julia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.

Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta: Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.

Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Pengadilan Pidana Anak.

### **Skripsi**

Andi Winarni, *Tinjauan Viktimologi terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Makassar*, Skripsi: 2013.

### **Literatur Lain**

<http://www.lensaindonesia.com/.../banyak-kasus-seksual-anak/komnasPA>.halaman ini diakses pada 30 Oktober 2013 pukul 15.00 WITA.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>; diakses pada 10 November 2013, pukul 19.20 WITA.

[http://wordpress.com/karakter\\_anak](http://wordpress.com/karakter_anak); diakses pada 10 November 2013, pukul 21.35 WITA.

*[http://dedotjcb.blogspot.com/hukum/teori\\_penanggulangan\\_kejahatan](http://dedotjcb.blogspot.com/hukum/teori_penanggulangan_kejahatan);*

diakses pada 14 November 2013, pukul 15.30 WITA.

*<http://yosie-indra.blogspot.com/2013/08/kejahatan-dan-penjahat.html>.*

Diakses pada 23 Desember 2013 pukul 21.07 WITA.